

PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan wahana bagi kita untuk membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Bangsa yang maju dan mandiri dibangun oleh manusia yang berkualitas dengan dasar ekonomi yang kukuh dan mandiri. Bangsa yang maju dan mandiri ditumbuhkan melalui peningkatan peranserta, produktivitas rakyat, dan efisiensi yang selanjutnya menjadi kekuatan dinamis bangsa yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan daerah adalah semua kegiatan pembangunan sektoral, dan regional yang berlangsung di daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pembangunan daerah tersebut diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu pembangunan daerah diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan antardaerah, antara kota dan desa, antarsektor. Percepatan pembukaan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan.

Pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan yang bertumpukan pada prakarsa dan kreativitas masyarakat. Pembangunan yang bertumpukan pada peraserta rakyat diselenggarakan secara merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBELUM PJP II

Dalam masa lampau sebelum berlangsungnya Repelita I kebijaksanaan mengenai pembangunan daerah belum direncanakan serasi dan efektif. Perhatian pembangunan diutamakan pada pemecahan masalah yang sangat mendesak pada waktu itu. Masalah-masalah pembangunan proyek-proyek, masalah perimbangan keuangan, dan masalah perdagangan antar daerah belum mendapat perhatian secara seksama.

Sejalan dengan tingkat perkembangan pada negara yang sedang muncul pada umumnya, pembangunan dipusatkan pada masalah mendesak jangka pendek, seperti peningkatan produksi, penyediaan bahan dasar dan upaya-upaya menjamin stabilitas nasional. Program pembangunan dipusatkan pada sektor-sektor yang berproduktivitas tinggi dan cepat memberikan hasil dengan ekonomis efisiensi tinggi.

Disamping itu bantuan kepada daerah ditujukan untuk meningkatkan (1) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan, (2) kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan (3) melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian daerah.

Bantuan khusus diberikan untuk pembangunan prasarana dasar, meliputi : prasarana perhubungan jalan, pendidikan, kesehatan, dan prasarana ekonomi berupa pembangunan pasar kecamatan.

Pelaksanaan pembangunan dalam lingkup Wawasan Nusantara tidak mungkin dapat dilakukan secara sentralistis penuh, juga tidak mungkin bila dilaksanakan secara otonomi penuh pada tingkat daerah. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi dalam pembangunan nasional.

Optimalisasi ini pada dasarnya, dapat dilakukan melalui sistem perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, yaitu tingkat nasional, daerah tingkat I, daerah tingkat II, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Masingmasing tingkat pemerintahan ini mempunyai peranan fungsi dan tugas tertentu dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Disamping itu, pemberian dana bantuan pembangunan daerah, perlu disertai dengan kebijaksanaan yang lebih transparan. Kebijaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dalam mengarahkan investasi pembangunan.

Dengan pengalaman penanganan program pembangunan daerah selama ini, diharapkan daerah semakin mampu dalam mengatur kebutuhan daerahnya masing-masing, sehingga bantuan pembangunan daerah lebih diintegrasikan dengan kebijaksanaan investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan daerah perlu ada suatu matriks program sektoral pada tingkat nasional dan program pembangunan daerah akan mengarahkan program pembangunan daerah dengan lebih jelas. Matrik ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Adanya pembagian pengelolaan antara program sektoral dengan program bantuan daerah dan program khusus akan mendukung optimalisasi pembangunan. Program bantuan daerah (Onpres) diarahkan langsung pada upaya mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat, sedangkan program sektoral (DIP) lebih diarahkan untuk mendukung program pembangunan daerah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Program sektoral yang selama ini dikelola pemerintah pusat secara berangsur-angsur dapat diserahkan kepada daerah.

Dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah, berarti kita memberi peluang bagi aparat pemerintah daerah, untuk dapat berkembang dan memantapkan kemampuannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SASARAN, KEBIJAKSANAAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DATI 11 DALAM REPELITA VI

Sasaran pembangunan daerah tingkat II adalah : Pertama makin mantapnya kemampuan aparat, kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah tingkat II kabupaten dan kotamadya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan

otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai sasaran ini dikembangkan kebijaksanaan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah tingkat II.

Ke dua, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas hidup masyarakat makin baiknya pemerataan dan ketersediaan fasilitas pelayanan dasar, serta makin meluasnya kesempatan kerja dan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal. Untuk itu dikembangkan kebijaksanaan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat.

Ke tiga, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah tingkat II secara lebih terpadu. Kebijaksanaan yang ditempuh adalah pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan daerah tersebut dikembangkan program pembangunan sebagai berikut (1) Peningkatan Kemampuan Aparatur, (2) Peningkatan Kemampuan Keuangan, (3) Peningkatan Prasarana dan Sarana, (4) Pengembangan Kegiatan Usaha Masyarakat, (5) Penanggulangan Kemiskinan, (6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (7) Penataan Ruang Daerah Tingkat II.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Daerah khususnya, desa dan kecamatan merupakan ujung tombak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah akan memacu bagi daerah dalam mengkoordinasikan program/proyek yang mendukung program pembangunan daerah.

Bantuan pembangunan daerah berupa dana, sarana, dan prasarana baik berasal dari Program Inpres maupun Program sektoral, harus dipandang sebagai suatu injeksi (stimulasi) untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal di daerah yang paling memerlukan. Pembangunan yang muncul dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, merupakan strategi pembangunan yang sangat diharapkan. Dengan demikian prinsip peranserta, efisiensi, dan produktifitas rakyat harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program pembangunan perlu memperhatikan 5 prinsip penting, yaitu

- (1) Prinsip targeting (*targeting mechanism*), yaitu terarah pada kelompok sasaran masyarakat, kegiatan ekonomi dan wilayah yang paling memerlukan.
- (2) Prinsip penyaluran (*delivering mechanism*), yaitu cepat, utuh, lancar, dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan dari kegiatan pembangunan tidak terganggu;
- (3) Prinsip penggunaan (*receiving mechanism*), yaitu masyarakat kelompok sasaran/daerah harus siap menerima dan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah;
- (4) Prinsip perguliran (*revolving mechanism*), yaitu pembangunan yang ditujukan kepada kelompok sasaran penduduk miskin lapisan bawah/daerah diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan ekonomi rakyat

secara berkelanjutan, sehingga bantuan ini dapat menjadi modal dasar (injeksi bukan infus);

(5) Prinsip pemantauan dan evaluasi (*monitoring mechanism*), yaitu dana, sarana, dan prasarana pembangunan yang ditujukan daerah/kepada kelompok sasaran masyarakat dapat dipantau dan dievaluasi. Dengan pencatatan walaupun sesederhana mungkin, tetapi dapat dievaluasi untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai tingkat keberhasilan dan upaya penyempurnaannya.

Memahami keadaan tersebut maka setiap kebijaksanaan yang ditujukan kepada daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat baik berupa dana, sarana dan prasarana harus memenuhi beberapa hal antara lain (1) benar-benar mencapai target sasaran penduduk, tempat dan kegiatan ekonominya, (2) dapat memicu dan memacu kegiatan ekonomi rakyat, (3) hasilnya dapat dinikmati sendiri oleh daerah dan rakyat yang bersangkutan, (4) hasilnya dapat dilestarikan dan berkelanjutan, dan (5) dengan keberhasilan yang diciptakan dan dinikmati sendiri maka keberhasilan ini dapat ditumbuhkan dikembangkan oleh daerah dan rakyatnya sendiri.

Masalah pembangunan berupa kesenjangan dan kemiskinan sebagai akibat ketimpangan yang masih berlangsung. Adanya kenyataan bahwa suatu daerah mempunyai potensi yang lebih rendah serta sumberdaya manusia dengan produktivitas rendah, merupakan salah satu keadaan adanya masalah pembangunan. Masalah-masalah ini justru harus dianggap sebagai daftar prioritas untuk mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan . Kesenjangan akan dapat diselesaikan jika terdapat saling pengertian diantara yang belum menikmati dengan yang sudah menikmati hasil pembangunan, antar yang kaya dan miskin.

Kesenjangan hanya dapat diatasi atau diperkecil dengan kepedulian secara bersama di antara pelaku ekonomi rakyat yang masih tertinggal dengan ekonomi maju. Pemerintah sebagai penentu kebijaksanaan perlu menjaga keseimbangan diantara keduanya. Kepedulian masyarakat secara bersama untuk mewujudkan keseimbangan menuju kesejahteraan seluruh masyarakat menjadi dasar pengembangan ekonomi nasional yang berakar pada pengembangan ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat dengan predikat serba tertinggal dalam proses pembangunan perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Dalam hal ini pemihakan secara nyata pada ekonomi rakyat tidak dapat dielakkan. Pemberian perhatian harus dengan pendekatan sosial ekonomi sesuai dengan tingkat pengembangan budaya masyarakat sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui pendidikan, keterampilan, keahlian, kemantapan manajemen, dan peningkatan kesadaran dalam pembangunan akan menjadi dasar penguatan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di desa tertinggal, mulai Repelita VI ditancarkan program khusus, yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Melalui Inpres ini dipadukan program sektoral ataupun regional yang diarahkan ke desa tertinggal sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Selain itu, disediakan pula dana sebagai modal usaha bagi masyarakat desa untuk membangun kemampuan dirinya.

Program IDT adalah juga merupakan pembangunan moral melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri, dan percaya diri masyarakat. Aparatur pemerintah di setiap tingkatan, terutama yang paling dekat dengan

masyarakat dituntut untuk makin peka, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan pembangunan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Langkah ini merupakan tekad untuk mengupayakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada aparat yang paling dekat dengan masyarakat, dan memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Program IDT mengandung 3 pengertian dasar, yaitu (1) sebagai pendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan, dan (3) sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui bantuan dan bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin.

Dalam mendukung program IDT secara langsung diberikan Program bantuan pembangunan prasarana penunjang program IDT, dengan tujuan (1) membuka isolasi desa-desa tertinggal untuk mendukung pengembangan usaha, peningkatan kesejahteraan dan mobilitas penduduk; (2) meningkatkan kesehatan masyarakat melalui tersedianya sarana penyediaan air bersih dan sanitasi; dan (3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana dan sarana jalan, jembatan, tambatan perahu, dan air bersih.

Dalam pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam pelaksanaan pembangunan dipersiapkan tenaga pendamping teknis yang membantu masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan melakukan perawatan setelah pembangunan selesai.

PENUTUP

Sebagai penutup kata, perkenalkanlah saya mengambil hikmah dari kebijaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini sebagai upaya dan sekaligus menjadi peluang meningkatkan peran nyata dari aparat pemerintah daerah.

Pembangunan nasional pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Meningkatkan kesejahteraan rakyat juga mengandung pengertian upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengikutsertakan setiap anggota masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi; secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang belum memperoleh kesempatan dalam pembangunan.

Adanya kepekaan yang makin tajam, kepedulian yang makin meningkat dan kesadaran bersama dari berbagai pihak yang memandang keterbelakangan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial dan kemiskinan sebagai masalah pembangunan akan menumbuhkan semangat dan tekad yang bulat untuk mengarahkan seluruh dana dan daya pada peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi sebuah gerakan nasional yang mempunyai kekuatan besar.

Dengan pengertian ini maka, pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan peluang yang amat luas untuk meningkatkan peran segenap unsur masyarakat.

Pertemuan seperti ini merupakan wujud tekad kita bersama untuk membangun kesamaan pemahaman tentang moral pembangunan dan pembangunan moral, serta

kepedulian kita untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang berintikan peran serta masyarakat, produktifitas dan efisiensi.

Dengan niat yang benar, tindakan (patrap) yang mantap, dan tekad yang tulus, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan misi luhur ini, mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan daerah.

Jakarta, 3 Juli 1995